



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 152 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);
6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 93 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam menyusun perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja Dinas setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
- b. sebagai panduan pelaksana teknis kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkat pemerintahan; dan
- d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra-PD meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan

BAB V : Penutup.

(2) Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi unit organisasi yang terdiri atas:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. unsur pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. unsur Pelaksana adalah Bidang terdiri atas:
 1. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Kesetaraan Gender dan Peningkatan Kualitas Keluarga, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 4. Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Penggerakan, yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
PERUBAHAN RENJA-PD

Pasal 6

- (1) Perubahan Rencana Kerja Dinas dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 152 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-PD disusun berdasarkan Rencana Strateis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

Terkait dengan posisi atau kedudukan dan fungsi, Renja-PD merupakan salah satu dokumen perencanaan perencanaan PD, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana PD. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); RPJMD; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan PD, terdiri atas Renstra-PD dan Renja- PD. Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun berpedoman kepada Renstra PD dan RKPD.

Berdasarkan ketentuan Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja-PD disusun melalui proses beberapa tahapan, sebagai berikut:

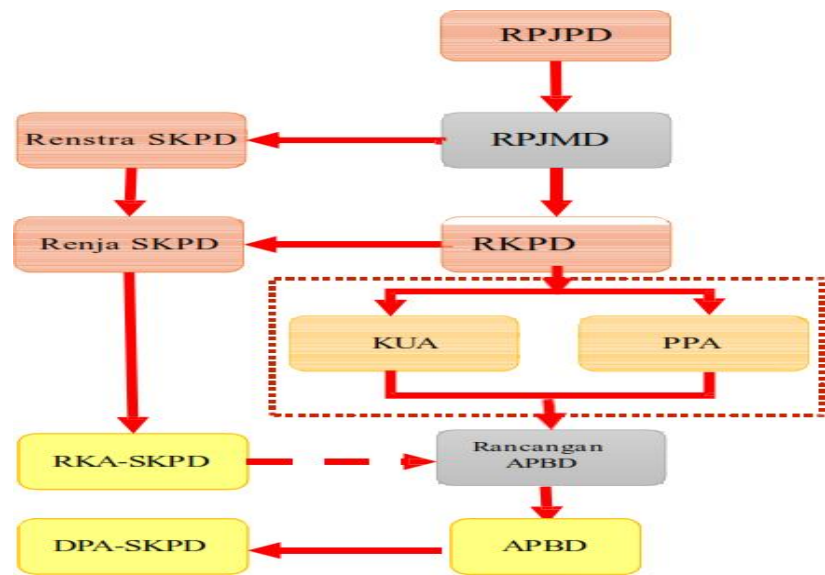
- 1) Tahapan Persiapan Penyusunan Renja-PD, dengan proses:
 - a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja-PD;
 - b. orientasi mengenai Renja-PD;
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja-PD;
 - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

- 2) Tahapan Penyusunan Ranwal Renja-PD, dengan proses:
 - a. PD menyusun ranwal Renja-PD paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - b. Penyusunan rancangan awal Renja-PD berpedoman pada Renstra- PD, hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan,
 - c. berpedoman pada Renstra-PD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dengan Renstra-PD;
 - d. berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja-PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja-PD dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra- PD;
 - e. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup: analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - f. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan; hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; tujuan dan sasaran Perangkat Daerah; rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan penutup;
 - g. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
 - h. Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD;
 - i. Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA dalam forum PD/lintas PD.
- 3) Tahapan Penyusunan Rancangan Renja-PD, dengan proses:
 - a. Penyusunan rancangan Renja-PD merupakan proses menyempurnakan ranwal Renja-PD berdasarkan SE Bupati tentang penyusunan rancangan Renja-PD;
 - b. Rancangan Renstra-PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD;
 - c. Rancangan Renja-PD disajikan dengan sesuai standar sistematika;
 - d. Rancangan Renja-PD disampaikan oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan ranwal RKPD menjadi rancangan RKPD;
 - e. Penyampaian Rancangan Renja-PD paling lambat minggu ketiga bulan Maret;
 - f. BAPPEDA diharuskan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja-PD, untuk dapat menjamin rancangan Renja-PD sudah selaras dengan rancangan awal RKPD;

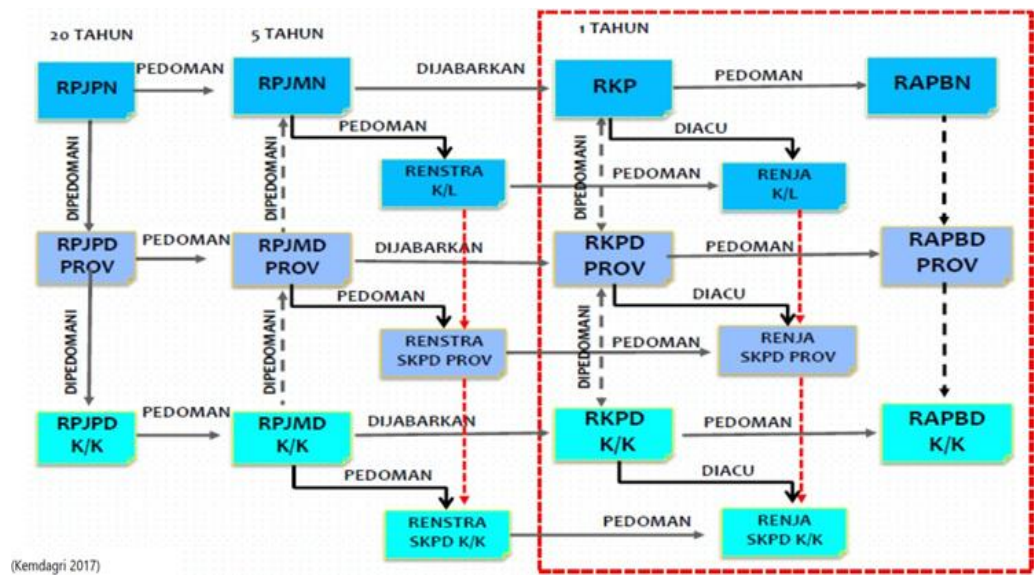
- g. Apabila berdasarkan hasil verifikasi, ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja-PD kepada PD;
 - h. Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut, kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja-PD;
 - i. Rancangan Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA;
 - j. Verifikasi rancangan Renja-PD dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja-PD kepada BAPPEDA.
- 4) Tahapan Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD, dengan proses:
- a. Forum PD/lintas PD dilaksanakan oleh kepala PD berkoordinasi dengan BAPPEDA.
 - b. Forum PD/lintas PD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD.
 - c. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja-PD.
 - d. Forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah SE Bupati diterima;
 - e. Hasil pembahasan rancangan Renja-PD dalam forum PD/lintas PD, dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum PD/lintas PD.
- 5) Tahapan Perumusan Rancangan Akhir Renja-PD, dengan proses:
- a. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja-PD menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD;
 - b. Perumusan rancangan akhir Renja-PD, dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan PD berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.
 - c. Rancangan akhir Renja-PD disajikan sesuai dengan sistematika.
- 6) Penetapan Renja-PD, dengan proses:
- a. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan kepala PD kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi;
 - b. Rancangan akhir Renja-PD, disampaikan paling lambat 1 minggu setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan;
 - c. Verifikasi yang dilakukan BAPPEDA, harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja-PD selaras dengan peraturan Bupati tentang RKPD dan Renja-PD lainnya;
 - d. Apabila hasil verifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD kepada kepala PD dan kepala PD harus melakukan penyempurnaan berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPEDA;

- e. Rancangan akhir Renja-PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala PD kepada kepala BAPPEDA.
- f. Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja-PD, paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja-PD;
- g. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja- PD yang telah diverifikasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- h. Penetapan Renja-PD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.
- i. Renja-PD menjadi pedoman PD dalam menyusun RKA PD.

Tahapan dan proses penyusunan Renja-PD diatas menunjukkan hubungan dan keterkaitan Renja-PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra-PD, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Restra-PD, seperti pada gambar di bawah ini:



Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan PD dan dokumen perencanaan daerah (kabupaten), Renja-PD juga memeiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi serta pusat, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja-PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja-PD ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan PD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra-PD dan RKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sesuai ketentuan Pasal 129 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Pemerintah Kabupaten Sumbawa
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026

Kinerja pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 ditentukan berdasarkan tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 sesuai dengan indikator kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan penelaahan terhadap rencana dan realisasi, maka diketahui sebagian besar target kinerja telah terpenuhi namun masih terdapat beberapa yang belum terpenuhi, yang dipengaruhi oleh beberapa kinerja yang belum optimal sehingga kinerja pelayanan atau pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa menjadi belum optimal.

Pada periode Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, diketahui terdapat sejumlah kegiatan/program yang anggarannya telah terealisasi sesuai rencana/alokasi dan sebaliknya juga terdapat realisasi yang tidak sesuai dengan jumlah rencana atau alokasi awal dalam APBD murni (DPA Murni) yang merupakan kesenjangan/gap terhadap alokasi anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Seluruh anggaran yang teralokasikan dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa ditujukan untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditentukan. Berikut disajikan alokasi dan realisasi anggaran seluruh untuk pembiayaan masing-masing indikator program yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024, yaitu:

Tabel 2.1 a Capaian target dan Realisasi Anggaran 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1.558.378.000	1.500.758.660	96,30
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	58.985.000	13.906.500	23,58
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	45.955.000	1.777.000	3,87
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Lap Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.030.000	12.129.500	93,09
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	1.499.393.000	1.486.852.160	99,16
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	63.275.000	62.002.500	97,99
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	162.988.000	161.213.000	98,91
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.260.000.000	1.255.177.910	99,62
	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diSektor Lain yang Dibentuk	6.910.000	6.590.750	95,38
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	6.220.000	1.868.000	30,03
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Penurunan kebutuhan ber KB	3.118.216.000	2.539.848.960	81,45

	KB	yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)			
		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	2.017.264.000	1.643.416.800	81,47
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	2.079.467.000	1.722.530.260	82,84
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian Program KKBPK	96.918.000	62.325.050	64,31
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1.198.312.000	1.060.163.660	88,47
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	352.867.000	207.781.300	58,88
	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	148.730.000	134.702.000	90,57
	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	282.640.000	257.558.250	91,13
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	499.290.000	492.915.000	98,72
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	499.290.000	492.915.000	98,72
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	539.459.000	324.403.700	60,14

	Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	4.343.000	4.279.400	98,54
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diKampung KB	535.116.000	320.124.300	59,82
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	2.017.264.000	1.643.416.800	81,47
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.602.000	24.514.000	43,31
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti KesertaanPenggunaa n Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.134.857.000	878.006.200	77,37
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	23.980.000	11.778.000	49,12
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	737.442.000	695.473.900	94,31
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.958.000	27.217.700	97,35
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Lap Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30.450.000	6.213.000	20,40
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	5.975.000	214.000	3,58
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	3.024.468.000	2.600.799.850	85,99

	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	554.868.000	426.339.850	76,84
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	69.875.000	45.133.500	64,59
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	68.768.000	11.047.300	16,06
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	275.000.000	248.648.400	90,42
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	78.755.000	74.660.750	94,80
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	62.470.000	46.849.900	75,00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.469.600.000	2.174.460.000	88,05
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin /Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin / kelahiran,	1.176.000.000	975.900.000	82,98

		Baduta/Balita)			
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1.293.600.000	1.198.560.000	92,65
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	137.320.000	131.471.850	95,74
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	129.030.000	123.181.850	95,47
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab/Kota	92.900.000	87.051.850	93,70
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	23.350.000	23.350.000	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	12.780.000	12.780.000	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	8.290.000	8.290.000	100,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	8.290.000	8.290.000	100,00

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENINGKATAN NILAI AKIP DINAS P2KBP3A	8.718.809.810	8.491.140.639	97,39
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	106.428.599	40.438.077	38,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan PD	27.375.200	24.282.477	88,70
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dok RKA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	3.136.280	1.962.500	62,57
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA- SKPD	1.641.280	1.488.000	90,66
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dok DPA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1.881.280	1.877.500	99,80
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA- SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA- SKPD	1.641.280	1.488.000	90,66
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.304.280	2.632.500	61,16
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	66.448.999	6.707.100	10,09
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.966.427.811	7.936.295.363	99,62
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.866.601.011	7.839.118.563	99,65
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.840.000	81.190.000	96,84
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	4.740.000	4.740.000	100,00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.540.000	2.540.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.256.200	2.256.200	100,00

	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.730.000	2.730.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	1.940.600	1.940.600	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.780.000	1.780.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	137.182.250	114.459.602	83,44
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24.856.250	7.795.000	31,36
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2.400.000	-	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.208.000	4.082.500	56,64
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.718.000	102.582.102	99,87
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	118.980.000	118.290.000	99,42
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118.980.000	118.290.000	99,42
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.216.000	106.306.166	86,28
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.215.500	25.323.500	93,05
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	76.295.000	63.032.666	82,62
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	19.705.500	17.950.000	91,09

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.575.150	175.351.431	65,78
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41.820.450	39.042.408	93,36
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	180.254.700	91.809.023	50,93
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9.500.000	9.500.000	100,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	35.000.000	35.000.000	100,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	45.600.000	44.674.000	97,97
		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik,ekonomi sosial dan budaya	32.915.000	32.915.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program /kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	45.600.000	44.674.000	97,97
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kab/Kota	11.320.000	11.180.000	98,76
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	11.320.000	11.180.000	98,76
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	11.380.000	11.057.000	97,16
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	11.580.000	11.257.000	97,21

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mengikuti sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	24.115.000	24.115.000	100,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	24.115.000	24.115.000	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	8.800.000	8.800.000	100,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	8.800.000	8.800.000	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunan rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	234.140.000	147.451.622	62,98
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	59.645.000	59.283.500	99,39
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab/Kota	59.645.000	59.283.500	99,39
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	127.985.000	44.991.122	35,15
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	127.985.000	44.991.122	35,15

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	46.510.000	43.177.000	92,83
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	46.510.000	43.177.000	92,83
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	17.160.000	15.700.000	91,49
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	17.160.000	15.700.000	91,49
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kab/Kota yang Tersedia	8.140.000	6.680.000	82,06
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	9.020.000	9.020.000	100,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA	218.158.000	188.785.750	86,54
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	80.088.000	74.305.750	92,78
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	69.738.000	64.395.750	92,34
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	10.350.000	9.910.000	95,75

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	138.070.000	114.480.000	82,91
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	17.255.000	17.255.000	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	33.325.000	33.215.000	99,67
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	28.025.000	4.775.000	17,04
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	59.465.000	59.235.000	99,61
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	235.175.000	150.136.596	63,84
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	51.545.000	47.519.400	92,19
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.545.000	47.519.400	92,19
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	149.120.000	68.346.196	45,83
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab/Kota	15.720.000	2.880.000	18,32
	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah AMPK yang	133.400.000	65.466.196	49,08

	Layanan AMPK	mendapatkan layanan			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	34.510.000	34.271.000	99,31
	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	34.510.000	34.271.000	99,31

Tabel 2.2 b Capaian Realisasi Kinerja 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian		
			Target	Realisasi	%
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk	1,84	1,32	139,39
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Dokumen kebijakan pengendalian kualitas penduduk	2	2	100,00
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Penyusunan dan Pemanfaatan GDPK Tingkat Kab/Kota	1	1	100,00
	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Lap Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	1	100,00
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	5	5	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Lap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	1	100,00
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Lap Pencatatan dan PengumpulanData Keluarga	1	1	100,00
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dok Pengolahan dan PeLap Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	12	100,00

	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	151	151	100,00
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Lap Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1	1	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA KB	Penurunan kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	13,90	9,02	154,1019956
		Persentase capaian kinerja pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	64,00	66,21	103,45
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	94,63	94,63
	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Lap Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	3	100,00
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24	24	100,00
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa Rakordes), dan Mini Lokakarya Minilok)	Jumlah Lap Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakorcam, Rakordes, dan Minilok	10	10	100,00
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dok Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5	5	100,00

	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	15	15	100,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB PKB/PLKB	Tingkat kesertaan KB di Daerah dengan kesertaan rendah	50,30	39,39	78,31
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan IMP	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	979	979	100,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	34	34	100
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dok Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	2	2	100,00
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) diKampung KB	34	34	100,00
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100	100	100
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	12	100,00
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang MKJP	Jumlah Orang yang Mengikuti KesertaanPenggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3075	3075	100,00

	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Lap Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	5	5	100,00
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	59	59	100,00
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Lap Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2	2	100,00
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Lap Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	4	4	100,00
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100	100	100,00
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA KS	Penurunan angka keluarga pra sejahtera	19.179	22.983	119,83
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	26	22,5	86,54
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Lap Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	1	1	100,00
	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	8	8	100,00
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	26	26	100,00

	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	20	100,00
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20	20	100,00
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang terlibat dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	392	392	100
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100	100	100,00
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	3825	3825	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan pemenuhan indikator kualitas keluarga	80	72,26	90,33
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender KG dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator pembangunan ketahanan keluarga yang terpenuhi	4	3	75

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kab	25	25	100,00
	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kab /Kota yang Tersedia	4	4	100,00
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lap Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab	1	1	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang dilatih	1	1	100
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	1	1	100,00
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PENINGKATAN NILAI AKIP DINAS P2KBP3A	75,49	73,39	97,22
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	7	7	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan PD	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok RKA-SKPD	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dok Perubahan RKA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan RKA-SKPD	1	1	100,00

	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dok DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok DPA-SKPD	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dok Perubahan DPA-SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Dok Perubahan DPA-SKPD	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Lap Evaluasi Kinerja PD	4	4	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8	8	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69	68	98,55
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	3	100,00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	538	538	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Lap Hasil Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dok Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan Lap Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	4	4	100,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dok PeLap dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	100,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dok Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	3	75
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	4	80,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dok Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	0	0,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	22	104,76
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pengadaan BMD Penunjang Urusan PD	1	1	100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11	11	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	100,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dok Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	1	100,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	100,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15	15	100,00

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang menerapkan analisis gender dalam proses penganggaran	54,57	56,36	103,28
		Persentase perempuan yang mendapatkan pemberdayaan pada sektor politik, ekonomi sosial dan budaya	0,062	0,061	98,39
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah program/kegiatan pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender	45	31	68,89
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan PUG Kewenangan Kab/Kota	1	1	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kab/Kota	1	1	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab	40	40	100,00
	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Kewenangan Kab	40	40	100,00
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mengikuti sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	90	90	100,00
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dok Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota	3	3	100,00

	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	1	100,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang Tersedia	4	4	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Penurunana rasio kekerasan pada perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) yang ditangani	5,2	5,7	109,62
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	1	3	300,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kab	2	3	150,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	100	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab	6	6	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten /kota yang mendapatkan pelatihan	12	26	216,67
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	65	65	100,00

		Kab/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase capaian kinerja pengelolaan sistem data gender dan anak	100	100	100,00
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terinput dalam sistem SIGA dan SIMPONI	100	100	100,00
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Data Gender dan Anak Kab yang Tersedia	12	12	100,00
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten	Jumlah Dok Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kab/Kota	2	2	100,00
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK PHA	Tingkat Pemenuhan Indikator KLA	70,07	77,55	110,68
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten	Jumlah lembaga Partisipasi Anak yang terbentuk	3	3	100,00
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20	20	100,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab	1	1	100,00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang difasilitasi	3	3	100,00
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab	100	100	100,00

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab	1	1	100,00
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab	2	2	100,00
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab	1	3	300,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,028	0,014	200,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak	3	3	100,00
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	120	120	100
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	100	100,00
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kab	45	20	44,44
	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	25	20	80
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2	6	300,00

	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	100	100	100,00
--	--	---	-----	-----	--------

Berdasarkan uraian di atas, maka berbagai faktor diketahui mempengaruhi kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, misalnya adanya perubahan kebijakan dalam regulasi terkait yang berpengaruh pada adanya perubahan prosedur/mekanisme kerja, dinamisnya perpindahan (mutasi atau promosi) PNS yang berpengaruh pada jumlah dan kualitas personil (SDM). Selain itu, berbagai permasalahan yang dihadapi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam progres pelaksanaan kebijakannya menjadikan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai organisasi hilir dalam menjalankan fungsi staf terhadap pimpinan daerah, dan hal itu membuat beberapa kebijakan penganggaran terhadap program dan kegiatan tertentu juga mengalami penyesuaian.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang disajikan dalam Tabel T-C.3 berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,24 anak per perempuan usia 15-49 tahun		2,43 anak per perempuan usia 15-49 tahun	2,43 anak per perempuan usia 15-49 tahun	100	2,33 anak per perempuan usia 15-49 tahun	2,33 anak per perempuan usia 15-49 tahun	
	2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah dokumen kebijakan/sinkronisasi yang disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	0 Dokumen	0 Dokumen	
	2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	0 Kegiatan	0 Kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Keluarga									
	2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	0 Dokumen	0 Dokumen	
	2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	30 PD		0	0		0 PD	0 PD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	
	2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	
	2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	
	2.14.03 - PROGRAM	Proporsi kebutuhan KB	83,5 Persen		82,6 Persen	82,63 Persen	100	83,10 Persen	83,1 Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)	7		3				0	
		Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	28,25 kelahiran per 1.000 perempuan an usia 15-19 tahun per tahun		31,20 kelahiran per 1.000 perempuan an usia 15-19 tahun per tahun	31,20 kelahiran per 1.000 perempuan an usia 15-19 tahun per tahun	100	29,69 kelahiran per 1.000 perempuan an usia 15-19 tahun per tahun	29,69 kelahiran per 1.000 perempuan an usia 15-19 tahun per tahun	
		Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	
	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Budaya Lokal									
	2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	0 Laporan	0 Laporan	
	2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	100	24 Laporan	24 Laporan	
	2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	100	24 Laporan	24 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Lokakarya (Minilok)									
	2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	26 Organisasi		26 Organisasi	26 Organisasi	100	26 Organisasi	26 Organisasi	
	2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah laporan kinerja pelaksanaan promosi, sosialisasi Program Bangga Kencana yang disampaikan oleh IMP	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	100	10 Laporan	10 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana								
	2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	960 Orang		960 Orang	960 Orang	100	960 Orang	960 Orang	
	2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kehamilan yang tidak direncanakan	10,7 Persen		11,5 Persen	11,5 Persen	100	11,1 Persen	11,1 Persen	
	2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Jaringan dan Jejaringnya									
	2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	408 5 Orang		230 5 Orang	2305 Orang	100	4085 Orang	4085 Orang	
	2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	
	2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	0 Laporan	0 Laporan	
	2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100	0 Orang	0 Orang	
	2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	16,5 Persen		8,5 Persen	8,5 Persen	100	11,80 Persen	11,80 Persen	
	2.14.03.2.04.0005 - Fasilitas Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di	Jumlah DASHAT di Kampung KB	52 Unit		0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	0 Unit	0 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kampung Keluarga Berkualitas									
	2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	52 Kampung		34 Kampung	34 Kampung	100	52 Kampung	52 Kampung	
	2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	87,95 Poin		83,54 Poin	83,54 Poin	100	85,72 Poin	85,72 Poin	
		Indeks Lansia Berdaya	63,35 Poin		56,6 Poin	56,6 Poin	100	59,88 Poin	59,88 Poin	
	2.14.04.2.01 -	Persentase keluarga yang	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga								
	2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	7 Laporan	
	2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100	10 Laporan	10 Laporan	
	2.14.04.2.01.0018 -	Jumlah Unit Sarana	10 Unit		26 Unit	26 Unit	100	10 Unit	10 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia								
	2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	100	15 Orang	15 Orang	
	2.14.04.2.02 -	Jumlah Tim Pendamping	392 TIM		392 TIM	392 TIM	100	392 TIM	392 TIM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga yang berperan serta aktif dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga								
	2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	
	2.14.04.2.02.0006 -	Jumlah Keluarga Berisiko	325 Keluarga		325 Keluarga	3250 Keluarga	100	3250 Keluarga	3250 Keluarga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0		0					
	2.14.04.2.02.0008 Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	
	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Daerah	71,38 Persen		69,22 Persen	69,22 Persen	100	70,29 Persen	70,29 Persen	
	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelembagaan PUG (melalui	40 PD		40 PD	40 PD	100	30 PD	30 PD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	pelatihan, bimtek, pendampingan								
	2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	
	2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	40 Lembaga		40 Lembaga	40 Lembaga	100	30 Lembaga	30 Lembaga	
	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	40 Lembaga		40 Lembaga	40 Lembaga	100	30 Lembaga	30 Lembaga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	40 Orang		40 Orang	40 Orang	100	30 Orang	30 Orang	
	2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dalam bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi berbasis gender	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	100	30 Lembaga	30 Lembaga	
	2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	90 Orang		90 Orang	90 Orang	100	90 Orang	90 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kabupaten/Kota									
	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM layanan (konselor, pendamping, pengelola lembaga) yang dilatih dalam aspek pemberdayaan perempuan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100	0 Orang	0 Orang	
	2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	1 Orang		1 Orang	1 Orang	100	0 Orang	0 Orang	
	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	
	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	70 Kasus		11 Kasus	11 Kasus	100	85 Kasus	85 Kasus	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
	2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	75 Lembaga		75 Lembaga	75 Lembaga	100	75 Lembaga	75 Lembaga	
	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	100	7 Layanan	7 Layanan	
	2.08.03.2.02.0003 -	Jumlah Korban yang	20 Orang		Orang	Orang	#DIV/0	20 Orang	20 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota					!			
	2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang		1 Orang	1 Orang	100	2 Orang	2 Orang	
	2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	8 Orang		6 Orang	6 Orang	100	8 Orang	8 Orang	
	2.08.03.2.02.0006 -	Jumlah Perempuan Korban	15 Orang		Orang	Orang	#DIV/0	2 Orang	2 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					!			
	2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	100 Orang		109 Orang	109 Orang	100	100 Orang	100 Orang	
	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	11 Orang		11 Orang	11 Orang	100	11 Orang	11 Orang	
	2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan	11 Orang		11 Orang	11 Orang	100	11 Orang	11 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota								
	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	
	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	
	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM	Cakupan data gender dan anak yang terintegrasi	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	DATA GENDER DAN ANAK	dalam SI								
	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	
	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	
	2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	100	30 Lembaga	30 Lembaga	
	2.08.05.2.01.0005 -	Jumlah dokumen hasil	1 Dokumen		Dokume	Dokume	#DIV/0	0 Dokumen	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	n		n	n	!	n	n	
	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks pemenuhan hak anak	62,77 Poin		60,87 Poin	60,87 Poin	100	61,81 Poin	61,81 Poin	
	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan skor/indeks komponen kelembagaan dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	130,5 Nilai		108,2 Nilai	108,16 Nilai	100	119,33 Nilai	#### # Nilai	
	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	100	30 Lembaga	30 Lembaga	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha								
	2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas lembaga penyedia layanan anak yang dilaksanakan	5 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
	2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kewenangan Kabupaten/Kota									
	2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	20 Lembaga		20 Lembaga	20 Lembaga	100	0 Lembaga	0 Lembaga	
	2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	#DIV/0!	0 Laporan	0 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
	2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	32 Lembaga		32 Lembaga	32 Lembaga	100	32 Lembaga	32 Lembaga	
	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Median Usia Kawin Perempuan (MUKP)	22,8 Tahun		22,5 Tahun	22,5 Tahun	100	22,5 Tahun	22,5 Tahun	
	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam	Jumlah kegiatan penyuluhan atau kelas keluarga sadar gender dan	1 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	1 Kegiatan	1 Kegiatan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	ramah anak								
	2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	
	2.08.04.2.02 -	Jumlah SDM lembaga	30 Orang		30 Orang	30 Orang	100	0 Orang	0 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	(kader/fasilitator/relawan) yang mendapat pelatihan terkait KG dan hak anak								
	2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	30 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	100	0 Lembaga	0 Lembaga	
	2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam	Jumlah layanan untuk keluarga yang disediakan dengan pendekatan	2 Layanan		Layanan	Layanan	#DIV/0!	0 Layanan	0 Layanan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	kesetaraan gender dan hak anak								
	2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	70 Orang		Orang	Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	
	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100	100 Persen	100 Persen	
	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah stakeholder yang mengikuti kegiatan sosialisasi/edukasi pencegahan kekerasan	75 Orang		75 Orang	75 Orang	100	75 Orang	75 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	8 Layanan		8 Layanan	8 Layanan	100	8 Layanan	8 Layanan	
	2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	46 Orang		20 Orang	20 Orang	100	46 Orang	46 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	17 Orang		20 Orang	20 Orang	100	17 Orang	17 Orang	
	2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	16 Orang		20 Orang	20 Orang	100	16 Orang	16 Orang	
	2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2 Orang		2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	2 Orang	
	2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi	45 Orang		20 Orang	20 Orang	100	45 Orang	45 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota								
	2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang		20 Orang	20 Orang	100	6 Orang	6 Orang	
	2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang		1 Orang	1 Orang	100	15 Orang	15 Orang	
	2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	100	20 Orang	20 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota								
	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan Penguatan Data dan Kapasitas Kelembagaan Perlindungan Anak	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	
	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100	100 Orang	100 Orang	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN PD	65,1 Poin		59,18 Poin	59,18 Poin	100	62,14 Poin	62,14 Poin	
	2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN PD yang mendapatkan Fasilitas Pengembangan Kapasitas	62 Orang		0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	
	2.08.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	62 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	0 Dokumen	0 Dokumen	
	2.08.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		0 Orang	0 Orang	#DIV/0!	0 Orang	0 Orang	
	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kategori AKIP PD	BB Kategori		73,39 Kategori	73,39 Kategori	100	BB Kategori	BB Kategori	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	77,38 Nilai		7 Nilai	7 Nilai	100	76,45 Nilai	76,45 Nilai	
	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	
	2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	
	2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	SKPD	Dokumen DPA-SKPD								
	2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	
	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	2 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	100	0 Laporan	0 Laporan	
	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	5 Dokumen		69 Dokumen	69 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tunjangan ASN	Tunjangan ASN								
	2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0 Orang / Bulan		12 Orang / Bulan	12 Orang / Bulan	100	69 Orang / Bulan	69 Orang / Bulan	
	2.08.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		350 Dokumen	350 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	
	2.08.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	586 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	586 Dokumen	586 Dokumen	
	2.08.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Semesteran SKPD	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada PD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	
	2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	
	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	2 Paket	2 Paket	
	2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	#DIV/0!	0 Paket	0 Paket	
	2.08.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	0 Dokumen	0 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Tamu									
	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	
	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	23 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	11 Laporan	11 Laporan	
	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	1 Dokumen	1 Dokumen	
	2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Paket		11 Paket	11 Paket	100	0 Paket	0 Paket	
	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	22 Unit		3 Unit	3 Unit	100	2 Unit	2 Unit	
	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	
	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	
	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemda	1 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	
	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	
	2.08.01.2.09.0002 -	Jumlah Kendaraan Dinas	1 Unit		6 Unit	6 Unit	100	1 Unit	1 Unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Th 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) = 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d th berjalan	
				(n-3)= (2023)	Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) = 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d th. Berjalan (th n-1)=2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		10 Unit	10 Unit	100	7 Unit	7 Unit	
	2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1 Unit	1 Unit	100	4 Unit	4 Unit	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD, yang dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa 5 (lima) tahun mendatang. Memperhatikan berbagai aspek termasuk uraian permasalahan diatas, maka isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di tahun 2025-2030 meliputi beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang sebagai unit kerja di Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan isu strategis pada masing-masing bidang, maka secara akumulasi, isu strategis PD yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan sesuai tugas dan fungsi PD, disajikan pada tabel dibawah ini:

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kehidupan Sehat Dan Sejahtera	1. Pembangunan masih belum berwawasan kependudukan	Kurangnya literasi kesehatan masyarakat Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	pengendalian penduduk sangat kompleks dan melibatkan berbagai dimensi, mulai dari demografi, lingkungan, ekonomi, hingga sosial-politik	pengendalian penduduk di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan jumlah penduduk, tetapi juga distribusi, kualitas, dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan	ketidakseimbangan demografi dan pembangunan sekaligus memastikan kualitas hidup yang merata	1. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) perlu benar-benar terintegrasi dan diimplementasikan dalam rencana pembangunan
	2. Pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB belum optimal					2. Rendahnya angka kesertaan KB aktif dan baru karena Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB untuk kesehatan dan kesejahteraan keluarga
	3. Pemberdayaan dan Peningkatan KS					3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan keluarga dalam membangun ketahanan dan kesejahteraan
Kesetaraan Gender	4. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kurangnya keterampilan, pemahaman teknologi dan kesetaraan gender Jumlah kebijakan yang	Pencapaian kesetaraan gender bukanlah hanya masalah keadilan	kesetaraan gender bukanlah hanya masalah "perempuan," melainkan	perkawinan anak dan kekerasan berbasis gender, serta	4. Tidak semua perempuan, bahkan yang aktif di ormas, memiliki kapasitas dan

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
		responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	moral, tetapi juga merupakan prasyarat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan kemajuan ekonomi di seluruh dunia	prasyarat fundamental untuk pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa secara keseluruhan. Membangun masyarakat yang setara memerlukan perubahan pola pikir, penguatan kerangka hukum, peningkatan akses	upaya untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan dan implementasi PUG di semua tingkatan	keterampilan yang memadai untuk berpolitik secara efektif, seperti lobi, negosiasi, atau penyusunan kebijakan.
	5. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan					5. Layanan terpadu masih belum optimal, Kualitas layanan yang bervariasi, kurangnya tenaga profesional terlatih, dan keterbatasan fasilitas sering menjadi kendala
	6. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak					6. Stereotip gender yang mengakar kuat dapat membatasi potensi anggota keluarga, menghambat perempuan untuk berpartisipasi penuh di ruang publik, dan membebankan peran ganda yang tidak adil
	7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak					7. Meningkatkan pemenuhan hak anak diantaranya pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
	8. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak					8. Melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran melalui program-program perlindungan anak
	9. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak					9. Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak belum optimal
Perlindungan dan pemenuhan hak anak						

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pelayanan Perangkat Daerah	10. Nilai akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah belum optima	Lemahnya Penegakan Hukum, Birokrasi, dan Pelayanan Publik → Sistem birokrasi yang kurang efektif, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kualitas pelayanan publik menghambat tata kelola pemerintahan yang baik.	Tantangan pelayanan pemerintahan yang membutuhkan adaptasi dan inovasi., peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan SDM, dan penguatan good governance	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan: Transformasi digital layanan publik, peningkatan indeks reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik karena belum sepenuhnya terbangun integrasi sistem layanan pubik.	Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi: Peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan publik, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan	10. Kualitas pengelolaan kinerja instansi pemerintah dan tata kelola birokrasi perangkat daerah belum optimal

2.1 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 30 Tahun 2025 tentang tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 tersebut ditetapkan setelah melalui proses Panjang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan perencanaan di daerah, yaitu dimulai atau diawali oleh pelaksanaan musyawarah di tingkat dusun (musdus) pada setiap desa dan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan pada setiap kelurahan. Reviu yang dilakukan oleh Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu tahapan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, dimana proses yang dilakukan adalah melakukan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses tersebut di atas dilakukan oleh Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, untuk memastikan bahwa telah terjadi keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta sasaran pembangunan daerah dengan Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana program-program prioritas daerah.

Proses reviu juga dimaksudkan untuk mengklarifikasikan berbagai usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kota dilaksanakan yang berkesuaian dengan

kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Dari proses rewi terhadap RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, terdapat beberapa temuan yang menjadi catatan penting, antara lain:

- a. Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu perangkat daerah tidak mendapatkan informasi terkait rancangan awal RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, sehingga tidak dapat dilakukan penelaahan terhadap kemungkinan atau potensi adanya perbedaan dengan rancangan awal RKPD dengan RKPD yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 merupakan RKPD pertama dalam periode RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, sehingga berbagai prioritas pembangunan belum sepenuhnya berkesuaian dengan visi misi bupati dan wakil bupati periode 2025-2029 karena masih memperhatikan dokumen RPJMD periode sebelumnya (2016-2021);
- c. RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 disebutkan sebagai penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, yang saat penyusunan RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 itu, dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Sumbawa tersebut masih dalam proses penyusunan sehingga penyusunan RKPD Tahun 2026 mempedomani tahapan dan priotas pembangunan tahap ke-4 dalam RPJPD Kabupaten Sumbawa 2005- 2025;
- d. Terdapat rumusan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan serta satuan ukur dalam RKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 yang belum sinkron dengan indikator program yang terdapat dalam dokumen Renstra maupun Renja Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa.

2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berenna Pemberdaaa Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah lainnya di Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pegendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi lainnya, termasuk hasil pelaksanaan dari Musrenbang RKPD Kabupaten Sumbawa dan pelaksanaan Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa.

Dalam tahapan pelaksanaan musrenbang kabupaten tidak ada usulan yang disampaikan ke Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa yang selarasa dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPPPA Kabupaten Sumbawa.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
-1	-2	-3	-4	-5	-6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) menyatakan bahwa pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. RKP tersebut mengusung tema Kedaulatan Pangan & Energi serta Ekonomi Produktif & Inklusif, yakni menekankan pada Ketahanan pangan dan energi sebagai pilar kedaulatan nasional, Transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya dan digitalisasi, penurunan kemiskinan ekstrem serta pertumbuhan inklusif yang adil.

Sasaran pembangunan RKP 2026 antara lain target pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3 persen yang mencerminkan orientasi percepatan pertumbuhan tinggi dan berkelanjutan, Gross National Income (GNI) per kapita sekitar US\$5.870 sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penurunan tingkat kemiskinan hingga 6,5–7,5 persen sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Selain itu, RKP 2026 juga menargetkan pengurangan ketimpangan dengan proyeksi rasio gini pada kisaran 0,377–0,380, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup hingga sekitar 76,67 persen sebagai wujud komitmen pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari Indeks Modal Manusia (Human Capital Index) sebesar 0,57. Di bidang lingkungan dan perubahan iklim, pemerintah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 37,14 persen, sebagai bagian dari komitmen nasional menuju pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Secara garis besar, RKP 2026 memuat komitmen pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat. Selain itu, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan energi, mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi industri, penguatan UMKM, dan peningkatan investasi, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon melalui perlindungan lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut didukung oleh upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penjagaan stabilitas nasional, serta pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan guna memastikan keberlangsungan pembangunan nasional. Muatan tersebut dituangkan kedalam sistematika dokumen RKP yang terdiri dari (1) Narasi, meliputi (i) Pendahuluan, (ii) Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Tema dan Sasaran Pembangunan, (iv) Prioritas Nasional dan Pendanaannya (v) Kaidah Pelaksanaal, (vi) Penutup, dan; (2) Matriks Pembangunan Prioritas Nasional, serta (3) Matriks Major Project.

Penyusunan RKP Tahun 2026 memperhatikan koherensi antarbab serta akurasi data dan informasi baik mengenai perumusan isu pembangunan, strategi dan arah kebijakan (sektoral dan kewilayahan), capaian pembangunan, target pembangunan nasional, integrasi sumber-sumber pendanaan, maupun pemenuhan terhadap kriteria kesiapan proyek (dalam proses clearing house). RKP dalam pembangunan nasional digunakan sebagai acuan penyusunan Renja K/L Tahun berkenaan dan penyusunan RKPD Tahun berkenaan. Selain itu juga menjadi referensi bagi BUMN dan Swasta untuk berpartisipasi dalam mendukung pencapaian target prioritas nasional tahun berkenaan.

Memperhatikan hal di atas, maka prioritas pembangunan pusat yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas SDM
- b) Transformasi digital dan tata kelola pemerintah

Arah kebijakan dan strategi pusat untuk mencapai tujuan pembangunan, antara lain:

- 1) Ketahanan Pangan: Mencapai swasembada pangan dengan fokus pada peningkatan produksi, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani/nelayan. Strateginya mencakup pencetakan sawah baru, penyaluran pupuk bersubsidi, modernisasi alat pertanian, dan penguatan peran Bulog.
- 2) Ketahanan Energi: Memperkuat kedaulatan energi melalui peningkatan produksi migas, percepatan transisi energi bersih (EBT), dan memastikan subsidi energi tepat sasaran.
- 3) Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Membangun generasi unggul dengan menargetkan 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita untuk mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas SDM, sekaligus memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal.
- 4) Pendidikan Bermutu: Meningkatkan kualitas pendidikan dengan alokasi anggaran terbesar dalam sejarah (20% APBN), berfokus pada kualitas guru, pendidikan vokasi, beasiswa, dan fasilitas sekolah.
- 5) Kesehatan Berkualitas: Menjamin layanan kesehatan yang adil dan merata melalui penguatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), revitalisasi rumah sakit, penurunan stunting, dan cek kesehatan gratis.
- 6) Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: Menghidupkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi desa/kelurahan, UMKM, dan akses pembiayaan murah untuk memotong rantai distribusi dan menciptakan lapangan kerja.
- 7) Pertahanan Semesta: Memperkuat kedaulatan bangsa melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan komponen cadangan, dan pengembangan industri strategis nasional.
- 8) Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global: Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat investasi produktif, memperkuat kemitraan swasta, dan mendorong hilirisasi industri untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Memperhatikan prioritas pusat pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Fokus utama mencakup penyederhanaan struktur organisasi, optimalisasi prosedur kerja, penguatan kapasitas lembaga dalam perencanaan dan pengawasan program, serta digitalisasi layanan publik melalui e-government dan integrasi data antarinstansi.

Selain itu, kementerian menekankan pengembangan sumber daya ASN melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penerapan sistem merit, serta penguatan manajemen kinerja instansi dengan indikator yang jelas dan mekanisme reward-punishment berbasis capaian. Sinergi pusat-daerah diperkuat melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan penyebarluasan praktik terbaik reformasi birokrasi. Seluruh upaya ini didukung oleh program penguatan integritas dan pemberantasan korupsi, untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat. Arah kebijakan tersebut akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	1. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Integrasi data kependudukan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan
		2. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pelayanan KB untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pembinaan berkelanjutan
		3. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
2	2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
		5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan kampanye anti kekerasan berbasis gender
		6. Memperkuat peran keluarga sebagai fondasi kesetaraan gender dan keadilan dalam rumah tangga serta masyarakat
		7. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak
		8. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
		9. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak
3.	4. Tata Kelola manajemen internal	10. Peningkatan pelatihan teknis,

No	Arah Kebijakan	Strategi
	dan Reformasi Birokrasi	fungsional, dan kepemimpinan (Diklat, Bimtek, e-learning) 11. Implementasi SAKIP dan penguatan proses bisnis manajemen perangkat daerah

Arah kebijakan dan strategi Kementerian PANRB untuk mencapai tujuan dijabarkan sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, yang diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kebijakan ini menekankan penyederhanaan struktur dan proses birokrasi, penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah berbasis hasil, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Strategi pencapaiannya meliputi penataan kelembagaan dan tata laksana, penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara, percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan integritas dan pengawasan internal, serta peningkatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional tahun 2026;
2. Digitalisasi dan modernisasi layanan publik yang bertujuan meningkatkan kualitas, kecepatan, dan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan ini diarahkan pada percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, integrasi layanan dan data antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Strategi pencapaiannya meliputi pengembangan layanan publik digital yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna, penyederhanaan proses bisnis layanan melalui digitalisasi end-to-end, peningkatan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan tata kelola dan keamanan data. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan nasional;
3. pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan mewujudkan aparatur negara yang profesional, kompeten, berintegritas, dan berdaya saing. Kebijakan ini diarahkan pada penguatan kualitas dan kapasitas ASN melalui penerapan sistem merit secara konsisten dalam manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan karier, hingga penilaian kinerja. Strategi pencapaiannya meliputi peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan organisasi dan tantangan pembangunan, penguatan budaya kinerja dan etika kerja aparatur, penataan

manajemen talenta ASN, serta peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan ASN. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk mendukung terciptanya ASN yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas guna menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional Penerapan Manajemen Kinerja Berbasis Hasil, melalui Penyusunan indikator kinerja yang jelas, terukur, dan relevan dengan tujuan strategis kementerian/lembaga, Penerapan mekanisme reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja, untuk mendorong budaya kerja produktif;

4. penguatan manajemen kinerja instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini diarahkan pada penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome-based management) melalui penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja instansi pemerintah dengan target pembangunan nasional. Strategi pencapaiannya meliputi penyempurnaan sistem perencanaan dan pengukuran kinerja, penguatan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja, serta penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi berbasis capaian kinerja. Seluruh arah kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk mendorong kinerja instansi pemerintah yang lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan nasional;
5. penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan kualitas layanan publik. Kebijakan ini diarahkan pada penyelarasan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan manajemen ASN antara tingkat pusat dan daerah agar berjalan konsisten dan saling mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Strategi pencapaiannya meliputi penguatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan reformasi birokrasi pusat-daerah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penerapan sistem merit dan manajemen kinerja, pendampingan serta evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, dan penyebarluasan praktik baik (best practices) antar daerah. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk mewujudkan pemerintahan yang terpadu, efektif, dan responsif, serta memastikan bahwa manfaat reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia;
6. penguatan integritas dan pemberantasan korupsi sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Kebijakan ini diarahkan pada pembentukan birokrasi yang berintegritas, bersih, dan bebas dari praktik korupsi melalui penguatan sistem pencegahan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Strategi pencapaiannya meliputi

penguatan implementasi zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), peningkatan efektivitas pengawasan internal dan sistem pengendalian intern pemerintah, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, serta integrasi nilai-nilai integritas dan etika dalam manajemen ASN. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi tersebut ditujukan untuk menumbuhkan budaya kerja aparatur yang berlandaskan integritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan sasaran penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2026

Menurut ketentuan Pasal 170 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan provinsi/kabupaten/kota. Sedangkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa program merupakan suatu penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah diperbarui melalui penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa umumnya dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada khususnya telah melakukan penyesuaian sebagaimana amanat kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam regulasi di atas dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi pemerintahan Daerah.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa merupakan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa misi yakni :Pemerintahan dan Birokrasi Unggul; Alam, lingkungan dan infrastruktur Unggul; serta Perekonomian Maju untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yaitu Mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju dan Sejahtera disebutkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Setiap program memiliki sejumlah kegiatan dimana setiap kegiatan merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Selanjutnya setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan yang merupakan serangkaian aktivitas belanja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan sub keluaran (*sub output*) dalam rangka mencapai keluaran (*output*) suatu kegiatan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, selain memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa juga memperhatikan beberapa hal lainnya yang juga menjadi amanat pemerintah pusat, antara lain:
 - a) Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 - b) Pencapaian SDGs,
 - c) Pengentasan kemiskinan,
 - d) Pencapaian NSPK dan SPM,
 - e) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan
 - f) Pengembangan daerah terisolir.
2. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2026 berjumlah 10 (sepuluh) program, setiap program memiliki sejumlah kegiatan dan setiap kegiatan terdiri dari sejumlah sub kegiatan. Tidak seluruh kegiatan dan/atau subkegiatan dalam program-program tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2026, namun selain disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah, yaitu:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.550.674.368	7 Kegiatan	26 Sub Kegiatan
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	54.356.000	3 Kegiatan	6 Sub Kegiatan
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.624.000	3 Kegiatan	8 Sub Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	28.000.000	3 Kegiatan	3 Sub Kegiatan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	20.990.000	1 Kegiatan	3 Sub Kegiatan
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	55.000.000	2 Kegiatan	6 Sub Kegiatan
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	201.026.000	3 Kegiatan	10 Sub Kegiatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	271.460.640	2 Kegiatan	6 Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	4.759.650.000	4 Kegiatan	14 Sub Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.184.540.000	2 Kegiatan	7 Sub Kegiatan

Anggaran seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 bersumber dari DAK Non Fisik dan APBD Kabupaten Sumbawa Tahun 2026, dengan total kebutuhan sebesar Rp. 22.313.321.008,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Rupiah).

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebutuhan dana/pagu indikatif menurut sumber pendanaannya disajikan dalam Tabel T-C.33 berikut:

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,08,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP PD		77,38	12.550.674.368,00				9.579.943.234,00
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.590.520,00			-	30.152.128,00
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		1 Dokumen	22.875.600,00				17.124.720,00
2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		1 Dokumen	1.969.280,00				1.293.370,00
2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		1 Dokumen	1.458.280,00				1.138.160,00
2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<i>Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	1.458.280,00				1.160.332,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		1 Dokumen	1.458.280,00				1.138.160,00
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		3 Laporan	1.710.800,00				1.829.953,00
2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		2 Laporan	4.660.000,00				6.467.433,00
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							-	
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		65 Orang/bulan	11.640.539.698,00				8.983.263.774,00
2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		12 Dokumen	81.480.000,00				85.480.000,00
2.08.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>		360 Dokumen	1.705.000,00				3.716.171,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		1 Laporan	1.220.000,00				1.211.702,00
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>		3 Laporan	1.585.000,00				1.051.526,00
	[Meningkatnya Kompetensi, Kinerja dan Disiplin ASN PD]	-	62,13	-	1.720.000,00	-	-	-	4.248.634,00
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							-	
2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>		0 Dokumen	1.720.000,00				4.248.634,00
	[Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja PD]	-	76,45	-	250.439.000,00	-	-	-	119.171.304,00
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		1 Paket	5.625.000,00				5.445.654,00
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>		1 Paket	1.250.000,00				2.910.000,00
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		12 Dokumen	2.400.000,00				2.400.000,00
2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>		1 Laporan	1.164.000,00				3.038.569,00
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		15 Laporan	240.000.000,00				105.377.081,00
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							-	
2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		100 Unit	72.500.000,00				0,00
2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		22 Unit	150.000.000,00				0,00
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		2 Laporan	15.770.000,00				28.162.193,00
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		1 Laporan	60.000.000,00				58.443.224,00
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		1 Laporan	18.000.000,00				18.124.983,00
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							-	
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		1 Unit	29.820.450,00				55.716.362,00
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		7 Unit	184.204.700,00				189.981.233,00
2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		5 Unit	6.100.000,00				1.220.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2,08,02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Daerah		71,38	54.356.000,00				111.676.154,00
	[Meningkatkan Keberdayaan perempuan]	-	70,29	-	29.536.000,00	-	-	-	55.685.000,00
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota							-	
2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG</i>		1 Laporan	8.776.000,00				12.050.000,00
2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah OPDkab/ kota yang mendapatkan pendampingan</i>		40 Lembaga	5.920.000,00				9.850.000,00
2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>		40 Lembaga	4.920.000,00				11.090.000,00
2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM OPD Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek</i>		40 Orang	9.920.000,00				22.695.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota							-	
2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi</i>		90 orang	17.820.000,00				45.838.776,00
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							-	
2.08.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek</i>		20 orang	7.000.000,00				10.152.378,00
2,08,03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif		100	187.624.000,00				183.523.000,00
	[Menurunnya kasus kekerasan pada perempuan]	-	100	-	52.580.000,00	-	-	-	52.580.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota</i>		10 Lembaga	52.580.000,00				52.580.000,00
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota							-	
2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota</i>		20 Orang	2.925.000,00				2.476.000,00
2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota</i>		8 Orang	8.700.000,00				8.700.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		6 orang	11.065.000,00				10.800.000,00
2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		8 Orang	20.034.000,00				6.480.000,00
2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		20 orang	34.000.000,00				33.709.000,00
2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		20 orang	23.520.000,00				33.709.000,00
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek</i>		100 orang	34.800.000,00				35.069.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2,08,04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Median Usia Kawin Perempuan (MUKP)		22,8	28.000.000,00				54.405.000,00
	[Meningkatkan kesejahteraan keluarga]	-	22,5	-	7.000.000,00	-	-	-	11.300.000,00
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	<i>Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		20 Orang	7.000.000,00				11.300.000,00
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		12 Lembaga	14.000.000,00				16.175.000,00
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	<i>Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/ Kota</i>		40 Orang	7.000.000,00				26.930.000,00
2,08,05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data gender dan anak yang terintegrasi dalam Sistem Informasi		100	20.990.000,00				29.230.000,00
	[Tersedianya Data Gender dan Anak yang terintegrasi]	-	100	-	20.990.000,00	-	-	-	29.230.000,00
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia</i>		2 Dokumen	13.950.000,00				7.720.000,00
2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	<i>Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak</i>		20 Lembaga	1.440.000,00				10.755.000,00
2.08.05.2.01.0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	<i>Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA</i>		1 Dokumen	5.600.000,00				10.755.000,00
2,08,06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)		62,77	55.000.000,00				132.881.580,00
	[Terpenuhi Hak Anak (IPHA)]	-	61,81	-	9.500.000,00	-	-	-	23.480.280,00
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		20 Lembaga	9.500.000,00				23.480.280,00
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							-	
2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek</i>		30 Orang	10.500.000,00				15.768.000,00
2.08.06.2.02.0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		1 Dokumen	7.000.000,00				14.013.810,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)</i>		10 Lembaga	7.000.000,00				14.013.810,00
2.08.06.2.02.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>		1 Laporan	14.000.000,00				5.043.600,00
2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota yang mendapatkan pendampingan</i>		10 Lembaga	7.000.000,00				60.562.080,00
2,08,07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif		100	201.026.000,00				238.824.000,00
	[Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak]	-	100	-	52.330.000,00	-	-	-	51.550.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.07.2.01.0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	<i>jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota</i>		5 Dokumen	52.330.000,00				51.550.000,00
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		35 Orang	22.000.000,00				1.012.000,00
2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		10 Orang	20.000.000,00				18.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/ Kota		25 Orang	20.000.000,00				19.125.000,00
2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota		5 Orang	8.700.000,00				8.700.000,00
2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota		35 Orang	20.034.000,00				25.200.000,00
2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/ Kota		17 Orang	10.440.000,00				68.026.000,00
2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		20 Orang	2.275.000,00				2.476.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/ Kota</i>		25 Orang	10.447.000,00				10.226.000,00
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mendapatkan bimtek</i>		100 Orang	34.800.000,00				34.509.000,00
2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				271.460.640,00				1.571.123.961,00
2,14,02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		2,24	271.460.640,00				1.571.123.961,00
	[Terkendalinya pertumbuhan Penduduk]	-	2,33	-	22.740.000,00	-	-	-	27.587.144,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							-	
2.14.02.2.01.0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	<i>Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga</i>		1 Kegiatan	1.440.000,00				8.735.000,00
2.14.02.2.01.0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota</i>		1 Dokumen	16.500.000,00				8.735.000,00
2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah</i>		30 Perangkat Daerah	4.800.000,00				10.117.144,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							-	
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>		2 Laporan	6.720.000,00				73.020.748,00
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>		12 Laporan	98.000.640,00				171.728.569,00
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>		12 Dokumen	144.000.000,00				1.298.787.500,00
2,14,03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka kelahiran menurut usia tertentu/Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun Persentase KB Pasca persalinan (KBPP) Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern (proportion of demand satisfied by modern methods)		100 28.2 83.6	4.759.650.000,00				6.545.759.450,00
	[Meningkatnya PUS sebagai Akseptor KB]	-	100 29.7 83.1	-	1.144.850.000,00	-	-	-	2.071.588.450,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal							-	
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>		2 Laporan	7.200.000,00				66.083.450,00
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>		24 Laporan	732.000.000,00				1.198.200.000,00
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>		24 Laporan	336.000.000,00				547.325.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>		3 Dokumen	31.250.000,00				72.650.000,00
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>		26 Organisasi	38.400.000,00				187.330.000,00
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)							-	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>		960 Orang	593.750.000,00				528.000.000,00
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota							-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>		2 Laporan	33.600.000,00				47.950.000,00
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>		4088 Orang	2.815.640.000,00				2.754.531.000,00
2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	<i>Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP</i>		1 Laporan	12.000.000,00				7.830.000,00
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>		2 Laporan	7.800.000,00				7.830.000,00
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	<i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>		4 Laporan	6.500.000,00				7.830.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB							-	
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB		52 Unit	139.000.000,00				764.500.000,00
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		52 Kampung	5.460.000,00				291.200.000,00
2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		3 Dokumen	1.050.000,00				64.500.000,00
2,14,04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Lansia Berdaya Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		63.3 87.9	4.184.540.000,00				3.657.445.000,00
	[Meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)]	-	59.9 85.7	-	1.048.540.000,00	-	-	-	1.049.380.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							-	
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>		7 Laporan / Dokumen	70.840.000,00				67.680.000,00
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>		10 Laporan	846.300.000,00				846.300.000,00
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>		10 Unit	130.000.000,00				130.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	<i>Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>		15 Orang	1.400.000,00				5.400.000,00
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							-	
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)</i>		10 laporan	1.176.000.000,00				1.176.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan PD dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Capaian Target	Anggaran	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</i>		3250 laporan	1.960.000.000,00				1.411.200.000,00
2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga</i>		1 Laporan	0,00				20.865.000,00

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini merupakan sebuah rencana kerja ideal yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026, baik dari sisi indikator, target serta indikasi pendanaan. Maka kualitas atau kuantitas kinerja seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai sumberdaya sebagai input, di antaranya anggaran. Dalam konsepsi sumber daya organisasi, tata kelola sebuah organisasi pemerintahan tentu melibatkan berbagai sumberdaya yang merupakan aset organisasi tersebut, misalnya konsep “5m+1i” (Man; Money; Material; Machine; Methode; Information), dimana 5m tersebut adalah sumber daya fisik yang berwujud, sedangkan informasi merupakan sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini dipakai oleh para penyelenggara pemerintahan untuk mengelola sumber daya fisik. Sumber daya informasi bukan hanya informasi dan data, tetapi juga terkait dengan sejumlah peralatan pendukungnya seperti perangkat keras dan lunak komputer, *database*, jaringan, dan lain-lain.

Sumber daya dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, secara terus menerus di tata ulang agar siap pakai terutama ketika terjadi suatu perubahan agar tetap dapat cepat beroperasi dan selalu dapat menghasilkan daya guna atau manfaat yang lebih tinggi atau semakin baik. Misalnya pelatihan pegawai, yang merupakan usaha untuk memperbaiki sumber daya manusia, penggantian mesin lama dengan mesin baru yang lebih modern. Semua usaha tersebut ditujukan untuk memaksimalkan penggunaan tiap sumber daya, meminimalkan waktu yang terbuang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas setiap unit kerja.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang optimal, harus diupayakan tersedia atau terpenuhinya seluruh sumber daya yang berkesesuaian. Tidak hanya dalam hal ketersediaan, namun tata kelola atau manajemen yang baik atas seluruh sumber daya yang dimiliki turut serta mempengaruhi tingkat keberhasilan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 ini disusun sesuai amanat perundang-undangan yang terkait dan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa kaidah-kaidah sebagai berikut:

- a. Bahwa Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Sumbawa Tahun 2026 merupakan implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Program dan kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan, dikendalikan sepenuhnya oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa selaku kepala PD dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sumbawa sesuai dengan tugas dan fungsi;

- b. Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 Menjadi pedoman penyusunan RKA Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2026 dengan mengacu kepada RKPD 2026 Kabupaten Sumbawa;
- c. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 dilaksanakan secara Akuntabel dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik dari seluruh Aparatus Sipil Negara di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa kepad Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.

Akhirnya, dibutuhkan suatu rencana tindak lanjut yang tepat dan terarah atas seluruh hal yang telah direncanakan dalam dokumen ini. Perencanaan yang baik merupakan setengah dari keberhasilan, maka dengan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi melalui pelaksanaan semua program, kegiatan hingga sub kegiatan yang direncanakan diharapkan akan tercapai tujuan, sasaran, manfaat, hasil dan keluaran melalui tata kelola amggaran yang lebih akuntabel, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang optimal serta terselenggaranya pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat.

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT